

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal. Pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.<sup>1</sup>

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai

---

<sup>1</sup> Ir. Antonius Tarigan, 2019, Mencermati Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Doktor FISIP Universitas Indonesia, Konsentrasi Kebijakan Publik

projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek- praktek yang terarah.<sup>2</sup>

Contoh yang dapat menjelaskan teori ini adalah kebijakan subsidi BBM dimana sebenarnya kebijakan tersebut memang berdimensi terhadap kesejahteraan masyarakat akan tetapi sebenarnya yang paling diuntungkan adalah para konglomerat yang memiliki industri, merekalah sebenarnya yang paling diuntungkan atas adanya kebijakan tersebut. Masyarakat telah di manipulasi pemahamannya terhadap subsidi BBM, terjadi distorsi informasi dalam pemahaman masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga stabilitas harga BBM, diperlukan berbagai formulasi strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target sasaran, diharapkan pengelolaan subsidi energi lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Pada periode tahun 2017-2020, realisasi subsidi energi mengalami

---

<sup>2</sup> Ir. Antonius Tarigan, 2019, Mencermati Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Doktor FISIP Universitas Indonesia, Konsentrasi Kebijakan Publik

<sup>3</sup> Taufiqurokhman, 2014, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar.

Salah satu pendorong kenaikan harga BBM adalah harga minyak mentah dunia yang tembus lebih dari USD100 per barel pada Maret 2022 dan masih bertahan hingga saat ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, harga BBM Pertamina sebaiknya ditahan dulu karena masih banyak skema dana kompensasi dari APBN ke Pertamina sebagai cara menahan kenaikan BBM nonsubsidi.<sup>4</sup> Penggunaan BBM Pertamina akhir-akhir ini cenderung meningkat, bahkan mencapai 21% terhadap total konsumsi bahan bakar. Adapun konsumsi bahan bakar minyak didominasi oleh Peralite sebesar 78%, sementara Pertamina turbo sebesar 1%. Jika dibanding dengan total konsumsi BBM nasional, maka porsi konsumsi BBM Pertamina terus meningkat mendekati 14%.<sup>5</sup> Sebelumnya sejumlah pihak mendorong Pertamina untuk segera menaikkan BBM Pertamina. Bahkan Kementerian ESDM telah menetapkan harga keekonomian atau batas atas harga BBM RON 92 pada Maret 2022 mencapai Rp14.562 per liter dan pada April 2022 harga keekonomiannya diprediksi Rp16.000 per liter.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dwi Aditya Putra, 2022, Efek Domino Dampak Kenaikan Harga Pertamina terhadap Perekonomian, [tirto.id, https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/efek-domino-dampak-kenaikan-harga-pertamax-terhadap-perekonomian-gqtD](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/efek-domino-dampak-kenaikan-harga-pertamax-terhadap-perekonomian-gqtD), diakses pada 20 Januari 2023

<sup>5</sup> Iqbal Dwi Purnama, 2022, Harga Pertamina Naik Jadi Rp 12.000 per Liter, Simak Curhatan Driver Ojol, [Sindonews.com, https://www.google.com/amp/s/ekbis.xindone.com/newsread/730813/34/harga-pertamax-naik-jadi-rp12000-per-liter-simak-curhatan-driver-ojol-1648818259](https://www.google.com/amp/s/ekbis.xindone.com/newsread/730813/34/harga-pertamax-naik-jadi-rp12000-per-liter-simak-curhatan-driver-ojol-1648818259), diakses pada 20 Januari 2023

<sup>6</sup> Verda Nano Setiawan, 2022, Harga Pasar Pertamina Bisa Rp 16.000, Nombok Pertamina Membesar, [cnbcindonesia.com, https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220328091252-4-326445/harga-pasar-pertamax-bisa-rp16000-nombok-pertamina-membesar/amp](https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220328091252-4-326445/harga-pasar-pertamax-bisa-rp16000-nombok-pertamina-membesar/amp), diakses pada 20 Januari 2023

Dalam rangka menjaga stabilitas harga BBM, diperlukan berbagai formulasi strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target sasaran, diharapkan pengelolaan subsidi energi lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Langkah pemerintah mempertahankan harga BBM Pertamina di bawah harga keekonomiannya dengan alasan untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno berpandangan bahwa jenis BBM Pertamina ini tidak pantas untuk disubsidi terus oleh pemerintah, karena dikonsumsi oleh orang mampu dengan kendaraan mewah. Sebaliknya subsidi BBM harus dirasakan masyarakat menengah ke bawah sehingga langkah menaikkan harga ini sangat didukungnya.<sup>7</sup> Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan Pertamina tidak mengharapkan keuntungan yang diambil dari kenaikan harga BBM Pertamina.<sup>8</sup>

Respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak

---

<sup>7</sup> Merdeka.com. 2022. Kebijakan Pembatasan, DPR Sebut BBM Subsidi Bukan Buat Orang Kaya, <https://www.merdeka.com/uang/kebijakan-pembatasan-dpr-sebut-bbm-subsidi-bukan-buat-orang-kaya.html>. Diakses pada 24 Mei 2023

<sup>8</sup> Insi Nantika Jelita, 2022, Harga Pertamina Naik, Ahok: Pertamina Tak Nyari Untung, <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/GNIW9nmK-harga-pertamax-naik-ahok-pertamina-tak-nyari-untung>, diakses pada 24 Mei 2023

langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya.

Pentingnya membahas terkait kebijakan kenaikan BBM adalah dengan adanya pemulihan ekonomi dalam era new normal pasca pandemi covid-19 dan sulitnya masyarakat Indonesia dalam mencari penghasilan, adanya kebijakan baru pada 3 september 2022 yaitu kenaikan harga BBM terutama pertalite menjadi Rp 10.000 per liter membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan kenaikan harga BBM, penulis lebih membahas bagaimana respon masyarakat dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini. Hal ini didukung dengan beberapa respon yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia di beberapa daerah.

Respon masyarakat terkait naiknya BBM ditunjukkan berdasarkan data analyst Continuum Data Indonesia dari Natasha Yulian yang mengatakan bahwa 92% masyarakat Indonesia memberikan respon negatif terhadap kenaikan harga BBM. Data tersebut diperoleh dari 891 ribu perbincangan mengenai BBM dari 424 ribu akun twitter dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 11 September 2022. Masyarakat memberikan respon dengan mengatakan bahwa ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi tetapi sudah dihantam oleh kenaikan harga BBM.<sup>9</sup>

Kenaikan harga BBM menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, Iman Kurniawan salah satu waga Jakarta Timur mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang secara mendadak menaikkan harga BBM. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Adi yang mengaku kecewa dengan kenaikan harga BBM yang

---

<sup>9</sup> Despian Nurhidayat, 2022, 92% Masyarakat Berikan Respon Negatif Terhadap Kenaikan Harga BBM, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/522931/92-masyarakat-berikan-respons-negatif-terhadap-kenaikan-harga-bbm>, diakses pada 17 Juli 2023

menjadi Rp 10.000 per liter untuk pertalite. Adi menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM saat ini sangat besar apalagi untuk masyarakat kecil seperti dirinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ferin yang merupakan masyarakat pengguna bahan bakar pertalite. Feri mengungkapkan bahwa sangat menyayangkan kebijakan pemerintah dengan kenaikan BBM karena dampaknya pasti akan lebih luas seperti sembako juga ikut naik. Rayyan seorang ojek online mengaku sempat bingung dengan harga BBM yang baru dan terjadi kenaikan harga BBM, Rayyan memberikan respon negatif dan mengatakan kenaikan harga BBM kurang tepat dengan penghasilannya yang pas-pasan. Rayyan juga mengatakan bahwa penghasilan tidak menambah bahan bakar justru menambah<sup>10</sup>

Kenaikan harga BBM membuat 200 massa dari Gerakan Penolak Lupa (Gepal) Gresik menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Gresik. Massa menyampaikan orasi dengan tuntutan utama penolakan terhadap kenaikan BBM. Massa aksi menganggap kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi BBM sehingga harga BBM menjadi naik merupakan sebuah kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, terutama rakyat miskin yang ada di negeri ini. Meskipun alasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan adalah adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat dengan cara memberikan bantuan atas kenaikan harga BBM, massa tetap

---

<sup>10</sup> Malvyandie Haryadi, 2022, Beragam Respon Warga Soal Naiknya Harga BBM: Bingung Hingga Keluhkan Pendapatan Tak Ikut, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/03/beragam-respons-warga-soal-naiknya-harga-bbm-bingung-hingga-yang-keluhkan-pendapatan-tak-ikut-naik>, diakses pada 17 Juli 2023

menganggap pemerintah tidak berpikir jernih dan rasional dengan melihat situasi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.<sup>11</sup>

Respon masyarakat terkait naiknya harga BBM juga diungkapkan oleh beberapa masyarakat Gresik yaitu salah satu sopir angkutan kota (Angkot), Rosmiadi mengaku kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan, pengeluaran naik. Rosmiadi menyatakan dalam sehari, dia mengisi BBM antara Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Sekarang, mengisi antara Rp100 ribu. Sementara respon berbeda datang dari Didik Kuswandi. Dia mengatakan kenaikan harga BBM sebenarnya tidak ada masalah. Meski begitu, Didik berharap agar kenaikan BBM Subsidi tidak berpenghuni ke kebutuhan pokok. Warga lain, Abdillah menambahkan, dari informasi pemerintah sudah memikirkan dampak dari kenaikan harga BBM. Yakni akan ada bantuan sosial. Abdillah berharap regulasi bansos tunai ini secepatnya bisa selesai sehingga tersalurkan.<sup>12</sup>

Fenomena yang terjadi di Desa Laban Kulon sejauh pengamatan penulis, kenaikan harga jual pertalite eceran jauh lebih tinggi dibandingkan yang dijual di SPBU. Jika di SPBU harganya hanya Rp 10.000 per liter sedangkan di penjual eceran mencapai Rp 12.000 per liter. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat di Desa Laban Kulon menyatakan bahwa untuk bahan bakar pertalite di eceran harganya sekitar Rp 11.500 -Rp 12.000 per liter. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini.

---

<sup>11</sup> DPRD Gresik, 2022, DPRD Gresik Menerima Aksi GEPAL Terkait Penolakan Kenaikan BBM, <https://dprd.gresikkab.go.id/berita/dprd-gresik-menerima-aksi-gepal-terkait-penolakan-kenaikan-bbm>, diakses pada 17 Juli 2023

<sup>12</sup> Akmalul Azmi, 2022, BBM Naik Respon Warga Gresik Beragam, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/426955/bbm-naik-respon-warga-gresik-beragam>, diakses pada 17 Juli 2023

Alasan penulis memilih Desa Laban Kulon Menganti Gresik karena di desa tersebut memiliki jarak dengan SPBU terdekat adalah 1,3 km. berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, semenjak naiknya pertalite, di SPBU terjadi lonjakan antrian pembeli sehingga masyarakat lebih mengurangi pembelian BBM di eceran. Selain itu, peneliti bertempat tinggal di Desa Laban Kulon, di desa tersebut semenjak mendengar kebijakan kenaikan harga BBM terutama pada pertalite, penulis mendengar banyak keluhan terkait kenaikan harga BBM di Desa Laban Kulon. Masyarakat banyak mengeluh dengan harganya yang semakin tinggi dan kebutuhan sehari-hari juga tinggi.

Adanya kenaikan harga BBM masyarakat memberikan respon negatif dengan lebih mengkritisi pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan lebih memilih antri di SPBU dibandingkan dengan membeli BBM di eceran karena harga yang memiliki selisih yang lumayan. Masyarakat tidak melakukan aksi demo ataupun melakukan mogok untuk menggunakan kendaraan karena kendaraan merupakan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga masyarakat tetap memilih menggunakan kendaraan hanya saja mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting.

Berdasarkan jabaran diatas, Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan BBM Pertalite Pada Pertamina Di Desa Laban Kulon (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Tahun 2022). Peneliti ingin melakukan studi kasus untuk melihat kebijakan tentang kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon dan respon masyarakat dengan adanya kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon.



## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan tentang kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon?
2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami respon masyarakat akibat kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon melalui pemahaman terhadap dua sub-fokus yaitu

1. Pemahaman terhadap kebijakan tentang kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon
2. Pemahaman terhadap respon masyarakat dengan naiknya BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi perkembangan ilmu politik, khususnya terkait respon masyarakat akibat kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Dengan mengetahui kenaikan harga jual pertalite diharapkan pemerintah mengkaji ulang dengan respon masyarakat yang ditimbulkan, kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk masyarakat untuk tetap tanggap akan kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pengembangan penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan respon masyarakat akibat kenaikan BBM pertalite pada Pertamina di Desa Laban Kulon.